



# **MENJAJAKI PENERAPAN JANGKA BENAH DI LAPANGAN**

---

CATATAN DARI KEBUN-KEBUN SAWIT MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TEBO (JAMBI)

Hery Santoso





## 1. Sekilas Tebo

**T**ebo adalah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Bungo Tebo, yang dilakukan pada tahun 1999. Mengacu pada data *Kabupaten Tebo Dalam Angka (2018)*, kabupaten ini kini memiliki luas sebesar 646.100 hektar (ha), terbagi ke dalam 12 kecamatan dan 112 desa. Kabupaten Tebo dihuni oleh sedikitnya 343.003 orang, dengan tingkat kepadatan sekitar 53 jiwa/km<sup>2</sup>. Perkebunan adalah potensi sekaligus mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di kabupaten yang menopang kawasan hutan seluas 276.691,14 ha ini.



Dua komoditas perkebunan yang menjadi andalan kabupaten ini adalah karet dan sawit. Karet sudah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Tebo sejak lama dalam bentuk kebun campur. Sementara itu, sawit adalah komoditas yang baru datang belakangan, akan tetapi dengan cepat bisa menarik minat banyak orang untuk memproduksinya,

baik dalam bentuk kebun sejenis maupun campur. Sawit dipandang bisa menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding karet. Bahkan, mengacu pada pendapat banyak kalangan juga pertumbuhan luasan kebun sawit yang sekarang ini ada di sana, ke depan diperkirakan sawit akan bisa menggantikan peran karet dalam hal menopang pertumbuhan ekonomi lokal di Tebo.

Para petani pekebun transmigran dari Jawa di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir (Kabupaten Tebo), misalnya, tidak segan-segan untuk membuka kebun-kebun sawit baru di dalam kawasan hutan sebagai perluasan dari kebun-kebun plasma yang sudah mereka dapatkan dari perusahaan. Para petani pekebun yang sebagian besar berasal dari Jawa Barat ini memandang bahwa dari sawit mereka akan bisa memperbaiki pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Meskipun demikian, mereka rata-rata masih mempertahankan kebun-kebun karet lamanya sebagai antisipasi dari kemungkinan jatuhnya harga sawit sebagaimana yang kini terjadi pada karet.

Para petani lokal juga demikian, mereka berusaha mengembangkan kebun-kebun sawit baru, sejenis maupun

campur, melengkapi kebun-kebun karet lama yang sudah mereka miliki dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitarnya, tidak terkecuali lahan-lahan terbuka di areal eks Hutan Pendidikan Silva Gama. Tidak heran kalau kemudian dalam kurun satu dekade lebih sebagian besar areal eks hutan pendidikan itu sudah berubah menjadi hamparan kebun sawit—sejauh ini tidak tersedia data yang bisa mengkonfirmasi berapa luas kebun sawit yang ada di areal eks hutan pendidikan itu.

Kelembagaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang pada akhirnya menjadi pengelola kawasan tersebut agaknya juga tidak cukup efektif mencegah perluasan kebun-kebun sawit masyarakat di areal eks Hutan Pendidikan Silva Gama, baik karena alasan keterbatasan sumber daya maupun perspektif pengetahuan tentang relasi sosial antara masyarakat dengan agroekosistem sawit maupun dengan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, di Desa Sungai Jernih sebagaimana yang sudah disinggung di depan, KPH Tebo Timur telah berhasil mengusulkan kebun-kebun sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan menjadi bagian dari program Perhutanan Sosial. Dengan demikian, tidak saja tenurial kebun-kebun itu menjadi legal, akan tetapi KPH juga bisa melakukan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Di Kabupaten Tebo, secara keseluruhan, kini setidaknya terdapat 114.147 hektar kebun karet, di mana sebagian besar (sekitar 98%) adalah kebun-kebun karet rakyat yang umumnya berupa kebun campuran, untuk tidak mengatakan agroforestri. Sejauh ini, data yang tersedia menyebutkan bahwa luas kebun karet rakyat mencapai 112.458 hektar, sedangkan karet perusahaan hanya sebesar 1.689 hektar. Berkebalikan dengan



karet yang produksinya didominasi oleh kebun-kebun rakyat, produksi sawit justru didominasi oleh kebun-kebun perusahaan yang secara keseluruhan luasnya mencapai 42.911 hektar, sementara sawit rakyat hanya sebesar 16.558 hektar—sebagian besar berada di dalam kawasan hutan, baik berupa sawit campur maupun sejenis.

Melihat angka-angka luasan itu, nampaknya sejauh ini karet masih menjadi penopang ekonomi masyarakat lokal yang belum tergantikan, bahkan oleh sawit sekalipun. Di tengah-tengah *booming* ekonomi sawit yang melanda masyarakat setempat, kebun-kebun karet masih terus dipertahankan, meskipun kini pasarnya sedang lesu. Kebun-kebun itu sepertinya menjadi sumber pendapatan pendamping dari kebun-kebun sawit yang mereka kembangkan. Dengan demikian, karet dan sawit adalah kombinasi ekonomi kekinian bagi sebagian besar masyarakat di Tebo, baik dalam bentuk kebun campur atau tanaman sejenis.

Dibandingkan dengan di tempat lain seperti di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur, model-model sawit campur di Tebo tidak terlalu berkembang. Pencampuran intensif dalam bentuk jalur, sebagaimana banyak kita jumpai di Kalimantan Tengah, jarang ditemukan. Pencampuran acak, untuk tidak mengatakan *campuraduk* sebagaimana yang banyak kita jumpai di Sumatera Utara, juga tidak banyak dijumpai. Pencampuran umumnya dilakukan dalam bentuk rumpang atau blok: kebun sawit sejenis berada dalam satu blok tersendiri, berdampingan dengan blok kebun karet, atau tanaman-tanaman komersial lainnya.

Terlepas dari itu semua, dalam pengembangan model sawit campur, Tebo dipandang sebagai lokasi yang strategis,

terutama karena alasan-alasan historis. Di Tebo pada tahun 1990an, setidaknya Fakultas Kehutanan UGM sudah mulai melakukan inisiasi untuk mengembangkan model sawit campur dengan tanaman-tanaman kayu, terutama meranti—hingga hari ini model itu masih bertahan. Melalui Hutan Pendidikan Silva Gama, pada masa itu, berbagai terobosan agroforestri sawit dibangun di wilayah ini sebagai upayaantisipasi ekspansi sawit yang begitu masif ke dalam kawasan hutan yang ada di sekitarnya, hal yang sekarang ini sedang terjadi. Atas dasar itulah, Tebo menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan skema Jangka Benah bagi kebun-kebun sawit di dalam kawasan hutan.

## 2. Sawit di Areal Eks Hutan Pendidikan Silva Gama



Selain Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tebo (Jambi) adalah lokasi yang dipilih oleh Tim Fakultas Kehutanan UGM untuk penerapan Jangka Benah bagi kebun-kebun sawit masyarakat yang berlokasi di dalam kawasan hutan. Salah satu alasannya adalah di sana terdapat eks hutan pendidikan Fakultas Kehutanan UGM (institusi penggagas Jangka Benah) yang kini sebagian besar tutupannya sudah berubah menjadi kebun sawit, terutama sawit swadaya yang dikelola masyarakat di sekitarnya. Selain itu, di Tebo juga terdapat uji coba penanaman sawit campur meranti yang pernah digagas oleh Fakultas Kehutanan UGM. Dengan dua alasan tersebut, diharapkan penerapan Jangka Benah pada kebun-kebun sawit di dalam kawasan hutan di Tebo bisa berjalan dengan baik, terutama yang berada di areal eks hutan pendidikan Silva Gama. Setidaknya Fakultas Kehutanan UGM sejak jauh hari telah membangun relasi sosial ekonomi dengan masyarakat di sana, sebuah modal yang diharapkan bisa membantu melancarkan penerapan konsep Jangka Benah.

Secara statistik, sawit di kawasan hutan

di areal eks hutan pendidikan Silva Gama terkonsentrasi di Kecamatan Muara Tabir, kurang lebih seluas 3.000 hektar. Berdasarkan ingatan banyak orang, masyarakat di sana mulai membudidayakan sawit sejak tahun 2004, ketika para pendatang dari Sumatera Utara, yang memang sudah berpengalaman, menyediakan bibit dan teknik budidayanya. Meskipun demikian, animo masyarakat Tebo untuk menanam sawit tidak bisa dipisahkan dari kenyataan yang lain: hadirnya perusahaan-perusahaan sawit yang dibarengi dengan pembentukan petani plasma, dan pendirian pabrik-pabrik pengolah kelapa sawit (PKS). Bagaimanapun, pabrik-pabrik itu adalah muara bagi produksi sawit yang banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Tabir.

Sejak itu, sebagaimana kalangan pekebun sawit di banyak tempat, masyarakat mulai meninggalkan karet yang telah menjadi soko guru ekonomi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi, dan beralih ke sawit. Apalagi setelah sawit-sawit plasma mereka menghasilkan dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi dari

karet, maka di samping plasma yang hanya 2 hektar/KK (kartu keluarga), masyarakat mulai memperluas areal tanaman sawitnya. Selain itu, karena Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbatas (sebagian besar sudah dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan sawit, hal yang juga terjadi di tempat-tempat lain), maka mereka pun memanfaatkan areal hutan bekas tebangan di sekitarnya yang terbuka dan tidak terurus. Areal semacam ini kemudian dibuka untuk perluasan kebun-kebun sawit masyarakat (wilayah yang kini telah menjadi areal Perhutanan Sosial).

Dalam pandangan hampir semua orang yang saya temui di Tebo, sawit dianggap sebagai “emas hijau”. Produktivitas yang tinggi, pemasarannya yang mudah, dan harga yang cenderung stabil adalah beberapa keunggulan yang tidak tertandingi oleh karet. Wajar kalau kemudian masyarakat mulai mengkonversi kebun-kebun karetnya, digantikan dengan sawit. Sementara itu, sebagian yang lain memilih mencampur, jika bukan menyisipi, tanaman karetnya dengan sawit. Sebagian yang lain bahkan berinisiasi membangun kebun sawit campur sejak awal. Tanaman sawit dicampur dengan berbagai tanaman lain seperti petai dan jengkol.

Meskipun demikian, sebagaimana yang sudah disinggung di muka, model kebun sawit campur yang dikembangkan di wilayah eks Hutan Pendidikan Silva Gama umumnya tidak berupa jalur atau larikan (seperti kasus di Kalimantan Tengah), ataupun pencampuran acak yang menyerupai pekarangan di Jawa (seperti kasus di Sumatera Utara). Kebun sawit campur yang banyak dijumpai di Tebo berupa cemplongan: mengelompok dalam bentuk tanaman sejenis untuk

setiap komoditas (karet maupun sawit) yang diproduksi. Itulah mengapa sepiantas akan terlihat bahwa kebun-kebun itu adalah tanaman sawit sejenis alias monokultur. Boleh jadi, gambaran kebun campur yang dikembangkan masyarakat di Tebo, khususnya Sungai Jernih, baru akan terlihat kalau dilihat dalam skala lanskap.

Berangkat dari pembelajaran di Kalimantan Tengah, praktik kebun sawit campur intensif dalam bentuk larikan-larikan pada umumnya banyak berkembang di wilayah-wilayah yang berjarak relatif jauh dari PKS. Semakin dekat dengan PKS ada kecenderungan masyarakat lebih memilih mengembangkan tanaman sejenis daripada kebun campur. Sebaliknya, semakin jauh dari PKS masyarakat cenderung menghindari tanaman sejenis. Bahkan di lokasi-lokasi yang sudah berjarak sangat jauh (lebih dari 50 km untuk kasus di Kalimantan Tengah), masyarakat sudah mulai mengkonversi kembali kebun-kebun campur sawitnya menjadi kebun karet dengan alasan sudah sulit menjual TBS (tandan buah sawit).

Jarak yang terlalu jauh akan semakin menurunkan tingkat keuntungan karena semakin panjangnya rantai pemasaran. Dalam situasi seperti ini, secara ekonomis produksi sawit akan dipandang berbiaya tinggi, setidaknya dibandingkan dengan karet. Meskipun rata-rata jarak tempuh ke pabrik-pabrik pengolah karet juga sangat jauh, akan tetapi mengingat umur ekonomi karet yang panjang (tidak mudah rusak), maka dalam kalkulasi mereka untuk jarak yang sama jauhnya karet dipandang lebih efisien untuk diproduksi.

Sebagaimana data lisan yang disampaikan oleh Kepala KPH Tebo Barat, kini di Kabupaten Tebo setidaknya terdapat

16 perizinan usaha perkebunan sawit yang total luasnya mencapai 42.911 hektar. Di sekitar Kecamatan Muara Tabir yang menjadi sentra produksi sawit di Tebo, terdapat 7 PKS yang menjadi muara penjualan sawit rakyat. Dengan jumlah PKS sebanyak itu, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Muara Tabir dan sekitarnya merasa tidak pernah mengalami kesulitan untuk menjual TBS. Bagi mereka yang tergabung dalam koperasi pemegang DO (*Delivery Order*) bisa menjual secara langsung ke PKS-PKS yang ada. Sementara itu, bagi kelompok tani yang tidak tergabung dengan koperasi pemegang DO biasanya menjual TBS melalui perantara-perantara yang ada di depo-depo di sekitarnya.

Boleh jadi karena kemudahan-kemudahan akses pasar semacam itulah maka model pencampuran kebun sawit masyarakat di Tebo, khususnya Muara Tabir, tidak dilakukan secara intensif, sebagaimana yang ada di Kalteng dan Sulut. Mereka cenderung lebih suka mengembangkan kebun sawit sejenis atau kebun sawit campur model rumpang alias cemplongan berbasis lanskap karena resiko pasarnya sangat kecil. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki kemudahan akses pasar, memproduksi tanaman sejenis akan sangat beresiko. Sekali harga jatuh, kerugian besar harus ditanggung. Bagi orang-orang seperti ini, kebun campur adalah jalan keluar yang rasional.





### 3. Sawit di Areal Perhutanan Sosial



**K**ebun-kebun sawit masyarakat yang berlokasi di dalam kawasan hutan, sebagaimana yang sudah digambarkan di muka, oleh KPH Tebo Barat dan Timur pada akhirnya diusulkan menjadi wilayah Perhutanan Sosial, dalam hal ini Hutan Rakyat (HTR) dan Kemitraan. Berdasarkan penuturan Kepala KPH, setidaknya itu dilakukan semata-mata untuk mengatasi persoalan tenurial (dalam hal ini ilegalitas penguasaan lahan), dan meningkatkan pendapatan dari sumber daya hutan yang ada di wilayah KPH. Dengan ditetapkannya kebun-kebun sawit masyarakat di dalam kawasan hutan sebagai wilayah kelola Perhutanan Sosial, maka dari kebun-kebun tersebut setidaknya bisa dikenakan berbagai pungutan, termasuk di dalamnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Di Kabupaten Tebo, HTR sawit terkonsentrasi di Desa Sungai Jernih (Kecamatan Muara Tabir), sebuah kawasan transmigrasi yang mulai dibuka pada tahun 1984. Sebagian besar dari penduduk Sungai Jernih adalah para petani migran dari Jawa Barat. Menurut mereka, pada awalnya masyarakat hanya membudidayakan tanaman palawija di lahan transmigrasi seluas 2 hektar yang disediakan pemerintah. Tidak banyak

yang bisa didapatkan dari budidaya palawija ini, karena meskipun hasil berlimpah, keterbatasan infrastruktur pada akhirnya membatasi akses pasar.

Situasi ini berlangsung bertahun-tahun, hingga kemudian memicu masyarakat untuk melakukan migrasi keluar dari Sungai Jernih. Mereka berusaha menjangkau berbagai wilayah di sekitarnya yang dipandang memiliki infrastruktur lebih bagus sehingga jangkauan pasar bagi produk-produk pertanian mereka tidak terkendala. Tahun 1991 pemerintah mulai mengembangkan program kemitraan inti-plasma sawit di Kecamatan Muara Tabir. Dari program ini masyarakat setempat, tidak terkecuali para petani migran di Sungai Jernih, berkesempatan untuk menjadi petani plasma di atas lahan seluas 2 hektar, di bawah mekanisme kemitraan dengan perusahaan.

Pada awalnya masyarakat tidak pernah menduga kalau dari sawit mereka bisa meningkatkan pendapatan secara cepat. Namun demikian sejak panen pertama pada tahun 1997, mereka baru menyadari bahwa sawit adalah emas hijau yang bisa menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu yang relatif cepat, setidaknya kalau

dibandingkan dengan palawija dan karet, tanaman yang sudah lama dibudidayakan kalangan masyarakat transmigran dari Jawa. Jika kedua produk yang disebut terakhir itu umumnya terkendala dengan akses pasar, tidak demikian dengan sawit yang pasarnya terbuka lebar dan jaraknya tidak terlalu jauh dari jangkauan. Bagaimanapun, pabrik-pabrik pengolah sawit (PKS) yang bermunculan di Kecamatan Muara Tabir memerlukan suplai bahan baku yang besar untuk memenuhi kapasitas terpasangnya.

Sejak saat itu, tanaman sawit mengalami *booming* di Sungai Jernih dan sekitarnya. Para petani migran dari Jawa yang semula melakukan migrasi keluar dari Sungai Jernih kini berbalik. Mereka kembali lagi ke desanya untuk memperluas kebun-kebun sawitnya yang semula hanya seluas 2 hektar. Lahan-lahan hutan eks Hutan Pendidikan Silva Gama yang sudah terbuka karena kegiatan pembalakan liar dan tidak lagi dikelola secara baik menjadi tujuan utama untuk melakukan perluasan kebun sawit. Pada sekitar 1999, mereka mulai membuka kebun-kebun baru di atas lahan tersebut. Bahwa lahan itu berada di dalam kawasan hutan, menurut penuturan hampir semua orang di Sungai Jernih, tidak ada yang mengetahui secara pasti, karena pada kenyataannya di lapangan tidak ditemui batas-batas yang jelas, di samping itu juga tidak ada petugas kehutanan yang secara periodik nampak mengelola kawasan tersebut.

*Booming* ekonomi sawit di Kecamatan Muara Tabir, khususnya di Desa Sungai Jernih, tidak semata-mata disebabkan oleh hadirnya perusahaan-perusahaan sawit yang kemudian mengembangkan mekanisme kemitraan dengan masyarakat setempat melalui skema inti-plasma. *Booming* juga didorong karena besarnya

inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam produksi sawit secara mandiri di lahan-lahan terbuka yang ada di sekitarnya. Inisiatif ini menjadi sangat terbuka karena dua hal: tersedianya lahan-lahan hutan yang bersifat *open access* dan sumber-sumber permodalan, baik perbankan maupun perorangan. Dengan dukungan dua faktor produksi utama, yakni lahan dan modal, maka *booming* sawit menjadi tidak terhindarkan.

Hampir semua petani migran di Desa Sungai Jernih kini memproduksi sawit, baik dalam skema kemitraan dengan perusahaan maupun sebagai petani mandiri. Kebun-kebun sawit masyarakat mandiri, yang umumnya berlokasi di dalam kawasan hutan sebagaimana yang sudah disinggung di muka, oleh KPH kini didorong untuk dikelola dengan skema Perhutanan Sosial (PS). Kalau mengacu pada PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial), di Kabupaten Tebo terdapat areal PS sebesar kurang lebih 87.000 hektar, sekitar 5.600 hektar tutupan lahannya berupa sawit. Sementara itu, di Kecamatan Muara Tabir terdapat sedikitnya 750 hektar areal PS yang lebih dari 50% (sekitar 430 hektar) memiliki tutupan lahan sawit. Di Desa Sungai Jernih, areal PS yang sudah diterbitkan ijin HTR nya seluas 283,15 hektar dengan 100% tutupan lahannya berupa sawit. Diperkirakan tanaman sawit di areal HTR itu kini telah berusia 12 tahun.

Sebagaimana yang diatur dalam P 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, HTR sawit yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Kasang Panjang di Sungai Jernih itu kini sedang didorong untuk menjadi kebun campuran, untuk tidak mengatakan agroforestri, yang prosesnya difasilitasi oleh KPH Tebo Timur. Tanaman kayu-kayuan yang dipilih sebagai pencampur adalah sengon, dengan alasan sengon

bisa meningkatkan kesuburan tanah dan kayunya laku dijual di pasar. Mereka sangat menghindari tanaman buah-buahan sebagai pencampur karena akan menimbulkan konflik pemanfaatan dengan Orang Rimba. Bagaimanapun, kebun-kebun sawit mereka adalah bagian dari ruang jelajah ekonomi Orang Rimba. Buah-buahan yang ada di dalamnya akan dipandang sebagai sumber makanan mereka.

Ketentuan bahwa tanaman sawit di areal Perhutanan Sosial harus dibongkar setelah 12 tahun sejak ditanam nampaknya tidak mungkin untuk diterapkan. Di mata masyarakat, ketentuan itu jelas akan ditentang, karena pada usia itu, sebagaimana yang mereka alami sekarang ini, tanaman sawit sedang berada dalam produksi puncak. Adalah naif kalau kemudian tanaman itu dibongkar begitu saja. Jika dipaksakan, bukan saja akan menimbulkan kerugian ekonomi, akan tetapi juga kerugian sosial: konflik vertikal akan memuncak. Kesadaran itu tidak saja tumbuh di kalangan masyarakat anggota KTH Kasang Panjang, akan tetapi juga di kalangan petugas lapangan KPH yang selama ini menjadi pendamping mereka. Oleh karena itu, jalan keluar yang akan ditempuh adalah bukan membongkar kebun sawit, akan tetapi menyisipi tanaman kayu-kayuan di antara larikan tanaman sawit yang sekarang ada. Jalan keluar ini telah disepakati bersama antara pihak KPH dan pengelola HTR di Desa Sungai Jernih.

Dalam hal rencana penerapan Jangka Benah untuk pengembangan sawit campur, kalangan masyarakat Sungai Jernih, terutama para anggota KTH Kasang Panjang, tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang mengancam keberlanjutan kebun-kebun sawit mereka, sejauh tidak dilakukan penebangan secara

intensif pada tanaman-tanaman sawit produktif. Untuk itu, dalam pandangan mereka penerapan Jangka Benah akan lebih efektif kalau diterapkan di kebun-kebun sawit sejenis yang masih muda, atau sekalian di kebun-kebun sawit yang sudah berumur lanjut. Pada kebun sawit muda sisipan tanaman-tanaman kayu bisa dilakukan untuk mengganti sawit-sawit yang pertumbuhannya kemati-matian, atau tanaman sawit yang oleh kalangan masyarakat setempat disebut sebagai "sawit jantan" (sawit yang tidak bisa berbuah). Sementara itu pada sawit tua sisipan bisa dilakukan sekalian untuk melakukan peremajaan.

Terlepas dari itu semua, menurut kalangan masyarakat Sungai Jernih, Jangka Benah harus bisa meningkatkan produktivitas kebun, baik secara keseluruhan maupun produktivitas tanaman sawitnya.

Sebagaimana yang kita ketahui, sejauh ini produktivitas kebun-kebun sawit rakyat tergolong sangat rendah, rata-rata hanya sebesar 1 ton/hektar, bahkan umumnya kurang dari itu. Penerapan Jangka Benah diharapkan bisa dijadikan momentum, tidak saja untuk meningkatkan mutu lingkungan, akan tetapi juga untuk melakukan penataan produksi, terutama sawit. Produktivitas yang selama ini rendah diharapkan dengan Jangka Benah bisa ditingkatkan. Tanpa itu semua, Jangka Benah akan dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat pekebun.



## 4. KPH & Peluang Penataan

Di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo (Jambi), peran KPH dalam mendorong percepatan PS dipandang sangat nyata. Hampir sebagian besar inisiasi PS di kecamatan tersebut dilakukan oleh KPH, selain oleh STN (Serikat Tani Nasional), lembaga sosial masyarakat (LSM) yang banyak bekerja mendorong PS di Jambi, Riau, dan sekitarnya. Meskipun demikian, secara kelembagaan baik KPH Tebo Barat maupun Timur, dua KPH yang selama ini aktif mendorong percepatan PS di Tebo, terkendala dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun pendanaan. KPH Tebo Barat misalnya,



sejauh ini hanya didukung oleh SDM (sumber daya manusia) sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala KPH, 1 orang tenaga teknis kehutanan, dan 4 orang tenaga kontrak Bakti Rimbawan. Sementara itu, anggaran yang tersedia sampai sejauh ini juga sangat terbatas, hanya sebesar kurang lebih 200 juta/tahun.

Keterbatasan juga tidak hanya terkait dengan SDM dan pendanaan, melainkan juga kapasitas kelembagaan maupun personal. Sejauh pengamatan saya, misalnya, perspektif pengembangan PS yang selama ini dilakukan dua KPH tersebut lebih ditujukan untuk kepentingan-kepentingan peningkatan penghasilan dari pengelolaan sumber

daya hutan daripada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju pengelolaan hutan berkelanjutan. Wajar kalau kemudian yang diutamakan adalah kebijakan disinsentif, berupa pungutan-pungutan, seperti PSDH, PBB (pajak bumi dan bangunan), bagi hasil, dan lain sebagainya. Upaya untuk mendorong proses produksi secara berkelanjutan pada pasca perijinan PS tidak terlihat secara nyata. Dengan kata lain bisa diungkapkan, bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, KPH lebih memilih peran pasif daripada aktif.

Hal-hal semacam itulah yang menjadi tantangan ketika kita memposisikan KPH sebagai lembaga yang bisa memainkan peran utama dalam pelaksanaan Jangka Benah di lapangan. Kapasitas kelembagaan dan personel pendukung KPH adalah kendala yang perlu segera diselesaikan, di samping komitmen yang juga perlu diluruskan dan dikuatkan: bukan mengutamakan kebijakan disinsentif, melainkan insentif; bukan bersifat pasif, melainkan proaktif. Tanpa itu maka upaya mendorong penerapan Jangka Benah pada kebun-kebun sawit masyarakat di dalam kawasan hutan melalui KPH tidak akan bisa berjalan efektif. Alih-alih bisa memainkan peran aktif dalam penataan sawit di dalam kawasan hutan, yang terjadi justru KPH memilih peran pasif dan berpikir persoalan hutan dan kehutanan di wilayahnya bisa diselesaikan oleh lembaga lain.

Terlepas dari itu semua, sejauh ini KPH masih dipandang sebagai lembaga yang paling strategis dalam pelaksanaan Jangka Benah di lapangan, mengingat struktur dan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya hutan di tingkat tapak. Di samping itu, praktik perkebunan sawit di dalam kawasan hutan adalah bagian dari

pekerjaan rumah KPH yang juga harus diselesaikan, dan Jangka Benah adalah sebuah pendekatan yang diharapkan akan menawarkan *win-win solution*, jika bukan sebuah proses resolusi konflik tenurial, bagi masyarakat pengelola kebun maupun KPH sebagai pengelola hutan. Atas dasar itu, maka ke depan upaya melakukan internalisasi Jangka Benah ke dalam kelembagaan KPH adalah sebuah kebutuhan. Peningkatan kapasitas personel dan kelembagaan KPH dalam memahami dan melaksanakan skema Jangka Benah perlu diadakan. Paket-paket pelatihan Jangka Benah untuk KPH perlu diselenggarakan sebelum konsep itu diterapkan di lapangan.

Pelaksanaan Jangka Benah bisa diposisikan sebagai bagian dari kegiatan pendampingan KPH terhadap pemegang ijin PS, khususnya HTR sawit, sebagaimana yang kita jumpai di Desa Sungai Jernih. Inisiatif KPH Tebo Barat dan Timur untuk mentransformasikan HTR sawit sejenis menjadi sawit campur melalui penanaman jenis kayu-kayuan, dalam hal ini sengon sebanyak 100 batang/hektar, bisa menjadi pintu masuk bagi pengembangan Jangka Benah bagi praktik PS di Sungai Jernih. Boleh jadi yang mendesak diperlukan adalah bagaimana membangun rancangan atau desain sawit campur yang tepat di wilayah tersebut.

Petunjuk teknis pelaksanaan Jangka Benah yang sedang dipersiapkan oleh KEHATI, bersama-sama dengan Tim Fakultas Kehutanan UGM, setidaknya bisa mulai diujicobakan di sana. Model-model kebun campur atau agroforestri sawit seperti jalur, rumpang, pagar dan lain sebagainya, bisa menjadi pilihan-pilihan.

## 5. Penutup dan Rekomendasi

Sawit, suka atau pun tidak, kini telah menjadi komoditas yang diproduksi oleh sebagian besar masyarakat desa hutan di Tebo, baik pendatang, lokal, bahkan kalangan masyarakat adat seperti Orang Rimba, untuk menopang keberlanjutan ekonomi lokal mereka. Sudah barang tentu, keputusan masyarakat untuk memproduksi sawit dan secara perlahan-lahan mulai meninggalkan karet didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ekonomi rasional. Kenyataannya, sawit bisa menopang kebutuhan uang tunai dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan komoditas-komoditas konvensional seperti karet dan palawija.

Hadirnya perusahaan-perusahaan sawit dengan pabrik-pabrik pengolahnya, tersedianya lahan-lahan hutan yang bersifat *open access*, mudahnya mendapatkan aneka input produksi seperti pupuk kimia, pasar yang terbuka lebar, harga yang cenderung stabil, demikian juga dengan mudahnya akses permodalan (perorangan maupun perbankan), secara tidak langsung telah menciptakan bangunan ekonomi sawit yang cukup kokoh.

Adalah keniscayaan kalau kemudian ekspansi kebun-kebun sawit masyarakat ke dalam kawasan hutan yang ada di sekitarnya terjadi sedemikian intensif. Bagaimanapun inisiatif KPH dan LSM setempat untuk memasukkan sekaligus mengusulkannya dalam skema PS adalah terobosan yang patut dihargai. Karena sebagaimana yang kita ketahui, P 83/2016 tentang Perhutanan Sosial sebenarnya tidak memberi celah yang leluasa bagi pengembangan tanaman sawit di areal PS. Atas dasar itu, maka untuk mendorong

proses resolusi agraria bagi sawit-sawit masyarakat di dalam kawasan hutan, juga untuk mendorong terwujudnya pengelolaan sawit rakyat berkelanjutan di Tebo, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan percontohan model sawit campur atau agroforestri sawit yang bisa dijadikan referensi bagi masyarakat setempat. Inisiatif pengembangan sawit campur yang pernah diinisiasi oleh Fakultas Kehutanan UGM di salah satu lokasi kampus lapangan di Tebo, bisa menjadi pintu masuk strategis.
2. Penyiapan kurikulum dan pelatihan mekanisme penerapan Jangka Benah di lapangan bagi KPH yang akan menjadi lembaga penopang pengembangan sawit campur di lapangan.
3. Penyiapan kurikulum dan pelatihan analisis usaha tani sawit campur bagi para pihak, baik KPH maupun KTH pengelola PS sawit.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM KPH sebagai lembaga yang dipersiapkan untuk menjadi pendamping pengembangan kebun sawit campur.
5. Melakukan review kebijakan, utamanya P83/2016 tentang Perhutanan Sosial sehingga memungkinkan bagi pengembangan PS sawit secara berkelanjutan. \*\*\*





Jln. Bangka VIII No. 3B, RT 1/ RW 12, Pela Mampang, Mampang Prapatan,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12720  
[www.kehati.or.id](http://www.kehati.or.id), [www.revampingispo.com](http://www.revampingispo.com)